



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, (2005). *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama
- Ali, Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwari, M. Imron. (2014). *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2016). *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Maskun. (2013) *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Siregar, Alimuddin. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembar Negrara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 293) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792). Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

C. Skripsi dan Tesis

Abra, Emy Hajar. (2013). *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausula Arbitrase (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan)*. Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Tallesang, Sonda. (2014). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.

D. Jurnal

Ahadi, L. M. A. (2022). *Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum*. Jurnal Usm Law Review, Vol. 5. No.1, 110-127. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>

Amalia, A. R., Putri Raodah, & Nizia Kusuma Wardani. (2024) “Menjamin Hak Perempuan di Era Digital: Kewajiban Negara dan Tantangan Regulasi Nasional.” Jurnal Kompilasi Hukum, Vol .9, No. 2, 178-191 DOI: <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.184>

Amrullah, Salam. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” Jurnal Andi Djemma, Vol. 3, No. 1, 59-65. DOI: <https://doi.org/10.35914/jad.v3i1.338>

Ananda, N. N. P. T., & Mertha, I. K. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Reveng Porn).” Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 9 No. 4, 56-64.

Antoni, A. (2018). “Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Dalam Simak Online.” Jurnal Nurani, 17, No.2, 261-274. DOI: <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>

Ariyanti, Vivi. (2019). “Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, 33-48. DOI: <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>

- Asili, A. (2016). "*Paradigma Pornografi Dalam Aspek Hukum.*" *An Nisa'a*, Vol. 7, No. 2. 35-56. Link Akses: <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/annisa/article/view/839>
- Audi, Muhamad Kevin, dan Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). "*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*" *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2. No. 1, 14-21 DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>
- Bambang Sudjito, (2016). "*Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia.*" *Wacana Journal Of Social And Humanity Studies*, Vol. 19, No. 2, 66-72. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>
- Burris, Aubrey. (2015). "*Hell Hath No Fury Like A Woman Porned: Revenge porn And The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute.*" *Florida Law Review* 2325. Link Akses: <https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1789&context=flr>
- Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). *Criminalizing revenge porn*. *Wake Forest Law Review*, Vol. 49 No.2, 101-140. Link Akses: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2368946
- Darmawansyah, Adi. (2023). "*Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial di Indonesia.*" *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 1, No. 2, 82-97. DOI: <https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.62>
- Fauzah, Intan Nur, Sunardi Sunardi, dan Arfan Kaimuddin. (2024). "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge porn) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*" *Dinamika*, Vol. 30, No. 1, Link Akses: <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23625>
- Hervina Puspitosari dan Anggraini Endah Kusumaningrum. (2021). "*Victim Impact Statement sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn.*" *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No.1, 67-81. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>
- Kevin Audi, M., & Zakaria, C.A. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dihubungan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No.1, 14-21. DOI: <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.379>

- Nurhafifah dan Rahmiati. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 2, 341-362.
- Rawni Arndarnijariah, F., & Kameo, J. (2024). "The Right To Be Forgotten Sebagai Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Revenge Porn." Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol. 8, No. 1, 69-82. DOI: <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82>
- Romandanti, Nika Wela. (2023). "Pertanggungjawaban Pelaku Penyebarluasan Video Pribadi Yang Mengandung Pronografi Melalui Media Sosial Twitter." Jurnal Esensi Hukum, Vol. 5, No. 2, 44-56. DOI: <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.250>
- Silaen, F., & Siregar, S. A. (2020). "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." Jurnal Dharma Agung, Vol. 28, No. 1, 8-16. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.455>
- Winny Arisanti, Ni Putu dan Bela Siki Layang, I Wayan. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) menurut Hukum Positif Indonesia." Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9, No. 2.
- Yosihara, Aedo. (2025). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyebarluaskan Video yang Bermuatan Pornografi (Putusan No. 1230/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Utr)." Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 1, 7625-7630. Link Akses: <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/887>

E. Lain-Lain

- "Perkara Revenge Porn Bikin DJ East Blake Terancam 12 Tahun Penjara" <https://news.detik.com/berita/d-7322235/perkara-revenge-porn-bikin-dj-east-blake-terancam-12-tahun-penjara>, Diakses Pada 01 Juni 2024.
- Acep Nazmudin, Teuku Muhammad Valdy Arief, "Terdakwa Kasus "Revenge Porn" Di Pandeglang Divonis 6 Tahun Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2023/07/13/144837578/terdakwa-kasus-revenge-porn-di-pandeglang-divonis-6-tahun-penjara?>, Diakses Pada 01 Juni 2024.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan, (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*.